

## **ANALISIS PERANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM DALAM UPAYA PENGEMBANGAN UMKM DI KABUPATEN MALANG**

**Endi Sarwoko**

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam di Kabupaten Malang, menganalisis peran koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam sebagai sumber pembiayaan bagi UMKM, dan untuk menganalisis potensi dan permasalahan yang dihadapi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dalam menyediakan sumber pembiayaan bagi UMKM. Merupakan jenis penelitian Deskriptif, menggunakan data sekunder dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang meliputi data perkembangan KSP/USP selama 3 tahun (2006-2008), teknik analisis yang digunakan adalah analisis Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSP/USP mengalami perkembangan yang signifikan dilihat dari 4 indikator yaitu jumlah, anggota, penyerapan tenaga kerja, modal sendiri, serta indikator volume usaha semuanya mengalami peningkatan, sedangkan satu indikator yaitu modal pinjaman mengalami penurunan. KSP/USP memiliki peran yang cukup besar dalam pemenuhan permodalan, proporsi kredit modal kerja ke UMKM sebesar 79,81% dari total kredit yang disalurkan. Permasalahan yang diidentifikasi dalam perkembangan KSP/USP adalah: rendahnya kemampuan SDM, lemahnya tata kelola, dan belum optimalnya pembinaan dari pemerintah. Adapun potensi-potensi KSP/USP di antaranya adalah mendorong pertumbuhan sektor riil khususnya UMKM, mampu menciptakan keterkaitan jalinan usaha kemitraan antara koperasi-UMKM maupun pengembangan jaringan antar KSP/USP untuk perluasan akses, dan menjalankan fungsi intermediasi yaitu memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan pada sektor riil khususnya UMKM.

*Kata kunci: KSP/USP, UMKM, lembaga keuangan mikro.*

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) non bank memiliki peranan strategis untuk memenuhi kebutuhan permodalan UMKM. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit selama ini masih dominan karena berhasil mengumpulkan simpanan sebesar 68,82% dan menyalurkan kredit sebesar 43,93%, posisi terbesar kedua adalah BPR (Salam dalam Retnadi, 2007). Kondisi ini menunjukkan bahwa peran LKM selain BRI Unit dan BPR masih sangat rendah. Akibatnya, potensi UMKM yang begitu

besar belum dapat direalisasikan sebagai andalan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan terobosan untuk memberdayakan LKM di luar BRI Unit dan BPR agar UMKM dapat mengakses kebutuhan modal dengan mudah dan murah

Lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi merupakan salah satu lembaga yang mampu membiayai kegiatan bisnis UKM, sebab lembaga keuangan berbentuk koperasi mampu menyesuaikan ritme dan karakter yang melekat pada usaha mikro, kecil, dan menengah, artinya bahwa pendekatan dengan mengembangkan lembaga keuangan mikro terutama dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah cukup bijaksana (Sumodiningrat, 2004)

Walaupun koperasi simpan pinjam memiliki peran strategis bagi pengembangan UKM, tetapi dalam menjalankan usahanya belum mencapai keberhasilan seperti yang dilakukan oleh badan usaha lainnya. Subandi (2007) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya peran koperasi antara lain antara lain, sebagian pengelola koperasi belum memiliki kepekaan bisnis (sense of bisnis).

Data pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, sampai dengan 2007 di Kabupaten Malang terdapat 207 Koperasi Simpan Pinjam maupun Unit Simpan Pinjam. Sementara itu jumlah UMKM di Kabupaten Malang adalah 22.107 unit usaha. Melihat jumlah UMKM yang cukup besar merupakan potensi bagi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam untuk mengambil peran yang lebih besar dalam pembiayaan untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Malang.

Bank Indonesia (2001) menyebutkan bahwa dilihat dari jumlah pinjamannya (kredit/pembiayaan yang disalurkan), posisi KSP dan USP termasuk dua besar setelah BRI Unit Desa. Jumlah kredit yang disalurkan masing-masing sebesar Rp 6.141.400 juta (41,87%) untuk BRI Unit Desa serta Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi (USP) Rp 4.159.867 juta (28,36%). Kemudian dilihat dari jumlah lembaganya, KSP dan USP merupakan lembaga keuangan mikro yang paling banyak, dan tersebar ke pelosok tanah air. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian tentang peran koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Malang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam di Kabupaten Malang, untuk menganalisis peran koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam sebagai sumber pembiayaan bagi UMKM, dan untuk menganalisis potensi dan permasalahan yang dihadapi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dalam menyediakan sumber pembiayaan bagi UMKM.

### **Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam**

Menurut Bank Indonesia, lembaga keuangan mikro (LKM) dibagi menjadi 2 kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Kredit Desa (BKD). Sedangkan yang bersifat non bank adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Baitul Mal Wattamil (BMT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sedangkan

Ibrahim (2002) mengelompokkan lembaga keuangan mikro menjadi dua jenis yaitu yang bersifat formal dan informal. Lembaga keuangan mikro formal dalam bentuk bank adalah BRI Unit, BPR dan BKD. Lembaga keuangan mikro formal dalam bentuk bukan bank di antaranya koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam, dan pegadaian. Kemudian lembaga keuangan mikro informal di antaranya adalah LSM dan BMT yang belum berbentuk koperasi. Koperasi khususnya yang bergerak dalam usaha simpan pinjam, baik Koperasi simpan Pinjam (KSP) maupun Unit Simpan Pinjam pada Koperasi (USP), adalah lembaga keuangan mikro formal yang dapat melayani masyarakat terutama anggotanya dalam keperluannya untuk menyimpan dan meminjam dana.

Hasil penelitian Salam dalam Retnadi (2007), KSP dapat menjadi lembaga keuangan mikro yang sustainable apabila kebijakan publik cukup kondusif yang menyangkut aspek- aspek antara lain, pertama, peningkatan efektivitas regulasi dan supervisi, kapasitas kelembagaan, serta permodalan.

### **Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan yang memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun, dan dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp 50 juta (Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 Tanggal 29 Januari 2003). Sedangkan usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 1 miliar per tahun, serta dapat menerima kredit dari bank di atas Rp 50 juta sampai Rp 500 juta (Undang-undang No. 9 Tahun 1995). Usaha menengah adalah usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200 juta sampai dengan paling banyak sebesar Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 miliar (Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1999).

### **Peran KSP/USP bagi UMKM**

KSP dan USP mempunyai peluang untuk menjadi lembaga keuangan yang baik, sehat dan dipercaya masyarakat. Kuncinya adalah apabila dibangun dan dikembangkan dengan baik secara bersama oleh anggotanya. Peluang tersebut akan dapat dicapai apabila didukung oleh adanya perundangan/aturan/kebijakan yang memadai dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terkait dan berkepentingan untuk mengembangkan KSP dan USP dengan baik dan benar. KSP dan USP akan berkembang lebih pesat serta dapat lebih bermanfaat bagi anggotanya apabila didukung secara kuat oleh adanya sistem pengembangan keuangan koperasi yang terintegrasi yang pengoptimalan dananya dilakukan oleh bank koperasi yang dimiliki dan sekaligus digunakan oleh anggotanya (Sulaeman, 2004).

Pemberdayaan lembaga keuangan mikro (LKM) sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional, bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan, dapat

dilakukan dengan memperluas akses usaha kecil dan mikro (UKM) dalam mendapatkan fasilitas permodalan yang tidak hanya bersumber dari lembaga keuangan formal, tetapi juga dari lembaga keuangan mikro (LKM). LKM ternyata mampu memberikan berbagai jenis pembiayaan kepada UKM walaupun tidak sebesar lembaga keuangan formal, sehingga dapat menjadi alternatif pembiayaan yang cukup potensial mengingat sebagian besar pelaku UKM belum memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan. Potensi yang cukup besar tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga LKM masih menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan antara lain aspek kelembagaan, keterbatasan sumberdaya manusia dalam pengelolaan LKM dan kecukupan modal (Wijono, 2005).

Kedudukan dan kiprah koperasi dalam mendukung pemberdayaan UKM sebagaimana diteliti Subandi (2007), menemukan bahwa solusi yang diperlukan untuk memberdayakan koperasi sekarang ini adalah adanya komitmen yang kuat dan sekaligus upaya nyata dari pihak-pihak terkait khususnya pemerintah, gerakan koperasi dan lembaga koperasi untuk melakukan pembenahan dalam rangka pemurnian dan revitalisasi kegiatan usaha serta penguatan pembiayaan koperasi.

Hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur (2005) terhadap lembaga keuangan non bank (LKNB), untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, Situbondo, dan Jember menunjukkan bahwa partisipasi Lembaga Keuangan Non Bank dalam mendukung permodalan UKM pada ke-4 lokasi penelitian berkisar antara 49,43% sampai dengan 95,58% sedangkan partisipasi bank berkisar antara 10,90% sampai dengan 18,72%, dan sisanya adalah sumber modal sendiri. Selain itu diperoleh temuan dari berbagai bentuk model LKNB yang ada ternyata model *Freeder Point* merupakan bentuk pendanaan yang diminati dan ditanggapi positif oleh UKM pelaku Usaha. Selain itu, model penyaluran kredit lunak melalui Koperasi seperti dalam bentuk dana bergulir sangat diminati namun jumlah penyaluran kepada UKM terbatas sehingga sulit diakses pelaku Usaha yang jumlahnya sangat banyak.

KSP dan USP merupakan lembaga keuangan formal yang paling dekat dengan aktivitas UMKM, sehingga diharapkan dapat menjawab hambatan-hambatan yang dialami UMKM untuk mengakses pembiayaan dari perbankan karena tidak tersedianya jaminan yang layak. Oleh karena itu KSP dan USP seharusnya memiliki peran besar dalam pemberdayaan UMKM khususnya untuk penyediaan permodalan bagi UMKM. Lembaga keuangan formal non bank amat diperlukan dalam mendukung percepatan pemberdayaan UKM terutama bagi UKM di plosok-plosok dan pedesaan dimana akses lembaga perbankan masih terbatas.

Keberadaan sebagian besar UMKM yang tersebar di seluruh tanah air tetap saja tidak akan terjangkau oleh layanan perbankan yang masih terbatas. Ujung-ujungnya, UMKM akan tetap lari ke LKM formal maupun informal. Oleh karena itu perlu dicarikan terobosan untuk memberdayakan LKM di luar BRI Unit dan BPR agar UMKM dapat mengakses kebutuhan modal dengan mudah dan murah. Lembaga keuangan mikro yang paling tepat adalah untuk diberdayakan adalah KSP (Koperasi Simpan Pinjam).

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif, berusaha menganalisis kontribusi KSP/USP dalam memenuhi kebutuhan permodalan UMKM. Telaah dimulai dari perkembangan KSP/USP selama 3 tahun terakhir (2006-2008) dilihat dari sisi jumlah lembaga, jumlah anggota, modal, volume usaha, pelayanan kredit, syarat kredit, dan kemampuan menyediakan pembiayaan, termasuk pula besarnya kredit yang disalurkan pada UMKM. KSP/USP yang digunakan sebagai sampel sebanyak 207 unit yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malang.

### **Variabel Penelitian**

1. Perkembangan KSP dilihat dari indikator jumlah lembaga, jumlah anggota, jumlah tenaga kerja, modal, dan volume usaha.
2. Peran Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dilihat dari partisipasi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dalam mendukung permodalan UMKM atau proporsi kredit yang disalurkan pada UMKM dibandingkan total kredit yang disalurkan. Semakin besar kredit yang dialokasikan pada UMKM menunjukkan semakin besar partisipasi atau peran koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
3. Potensi dan permasalahan merupakan keunggulan-keunggulan dan kelemahan KSP dalam menyediakan pembiayaan bagi UMKM.
4. Pengembangan KSP merupakan upaya-upaya yang dapat ditempuh agar KSP menjadi mandiri dan *sustainable* mencakup peningkatan efektivitas supervisi, kapasitas kelembagaan, serta permodalan.

### **Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh KSP/USP yang ada di Kabupaten Malang. Sampel diambil menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. KSP/USP yang aktif, ditunjukkan melaksanakan RAT secara rutin, dan melaporkan kinerja keuangannya kepada Dinas Koperasi.
2. KSP/USP yang aktif telah berdiri telah beroperasi pada wilayah kerjanya lebih dari 2 tahun.

Jumlah sampel yang memenuhi kriteria tersebut adalah 202 KSP/USP yaitu koperasi aktif yang melaksanakan RAT dan telah beroperasi pada wilayah kerjanya lebih dari 2 tahun.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yang bersumber dari data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang.

### **Teknik Analisis Data**

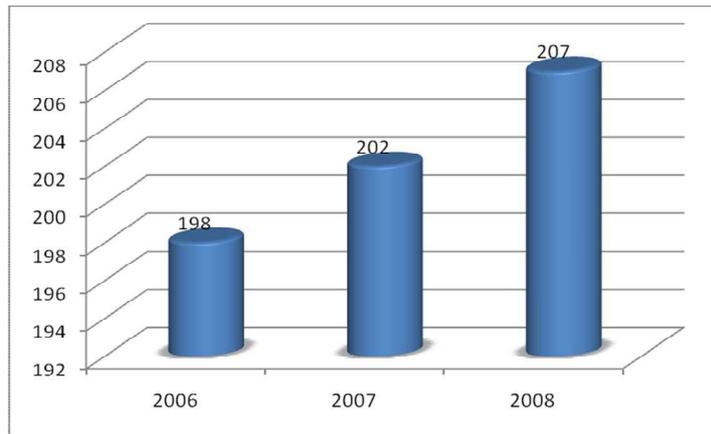
Data yang diperoleh dari suvey maupun dokumentasi, dilakukan analisis dengan metode Deskriptif. Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Analisis terhadap perkembangan jumlah lembaga, jumlah anggota, permodalan, dan volume usaha selama tahun 2006, 2007 dan 2008, digunakan untuk mengetahui perkembangan KSP/USP di Kabupaten Malang.
2. Analisis perkembangan besarnya penyaluran kredit kepada UMKM selama 3 tahun terakhir, digunakan untuk mengukur besarnya peran KSP/USP dalam pembiayaan UMKM.
3. Analisis kemampuan KSP/USP dalam menyediakan pembiayaan bagi UMKM, digunakan untuk mendeskripsikan potensi dan permasalahan yang dihadapi koperasi dalam mengembangkan UMKM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

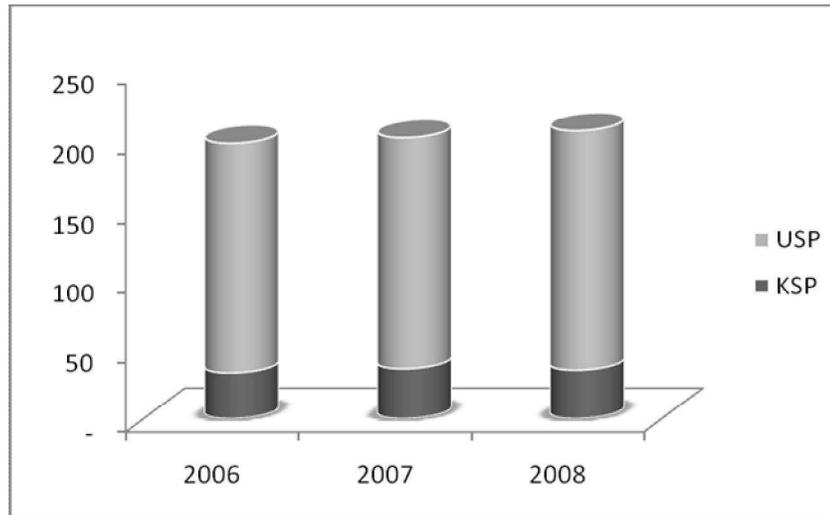
### Perkembangan KSP/USP

Berdasarkan indikator perkembangan jumlah koperasi, pada tahun 2006 jumlah KSP dan USP di Kabupaten Malang mencapai 198 unit, bertambah menjadi 202 pada tahun 2007 atau meningkat 2,02% selanjutnya menjadi 207 unit pada tahun 2008 atau meningkat 2,48%. Peningkatan jumlah KSP dan USP ini ternyata sejalan dengan besarnya peningkatan jumlah koperasi secara nasional yang mencapai 2,77% pada tahun 2009.



Gambar 1. Perkembangan KSP/USP

Komposisi jumlah USP jauh lebih besar dibandingkan jumlah KSP, rata-rata 16-18% adalah berbentuk KSP dan 82-84% berbentuk USP. Hal ini dimungkinkan karena KSP merupakan salah satu bentuk koperasi yang hanya melayani penyimpanan dana dan penyaluran dana dalam bentuk kredit, sedangkan USP merupakan bagian dari unit usaha koperasi yang fokus pada penyimpanan dan penyaluran dana. Koperasi dalam bentuk apapun biasanya memiliki unit usaha berupa simpan pinjam berarti masuk kategori USP, sedangkan KSP memang sejak berdirinya hanya memfokuskan pada unit usaha simpan pinjam saja.



Gambar 2. Komposisi KSP dan USP di Kabupaten Malang

Indikator jumlah anggota, pada tahun 2006 KSP dan USP di Kabupaten Malang berhasil memiliki jumlah anggota sebanyak 72.064 orang, meningkat menjadi 75.468 orang pada tahun 2007 atau meningkat 4,72% dari tahun 2006, dan pada tahun 2008 jumlah anggota sebanyak 76.522 orang atau meningkat 1,40%. Ternyata peningkatan jumlah anggota pada tahun 2008 lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan jumlah anggota tahun 2007.

Indikator penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2007 jumlah tenaga kerja koperasi meningkat 220 orang atau meningkat 22,42%, dan pada tahun 2008 meningkat 30 orang atau 2,48% dari tahun 2007. Penyerapan tenaga kerja KSP/USP ini walaupun masih relatif kecil tetapi menunjukkan peran KSP/USP dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Malang.

Indikator modal sendiri dan modal luar, Pada tahun 2006 dan 2007 jumlah modal sendiri KSP/USP di Kabupaten Malang mencapai Rp 79.126.460.000, atau tidak mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2008 mencapai Rp 113.617.830.000,- atau meningkat 43,59% dari tahun 2007. Walaupun terjadi peningkatan modal sendiri yang cukup besar, tetapi jika dibandingkan dengan keseluruhan koperasi di Kabupaten Malang yang mencapai 117,23% maka peningkatan tersebut masih jauh lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan modal sendiri koperasi secara keseluruhan di Kabupaten Malang pada tahun 2008 memang mengalami peningkatan yang cukup besar, termasuk KSP dan USP. Sedangkan perkembangan modal luar, peningkatan modal pinjaman KSP/USP terjadi pada tahun 2007 yaitu mencapai 4,87% dari tahun 2006, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2008 yaitu 3,49%. Padahal secara keseluruhan koperasi di Kabupaten Malang jumlah modal pinjaman yang berhasil dihimpun koperasi masih menunjukkan adanya peningkatan yaitu 1% dari tahun 2007.

Terakhir tentang indikator perkembangan transaksi usaha koperasi yang dicerminkan oleh besarnya nilai volume usaha KSP dan USP di Kabupaten Malang

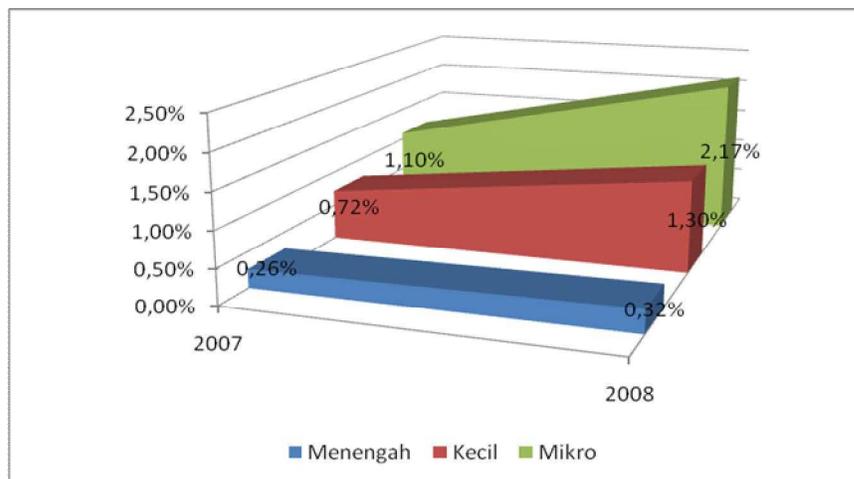
mengalami peningkatan sebesar 53,02% pada tahun 2007 dan meningkat lagi 57,39% pada tahun 2008.

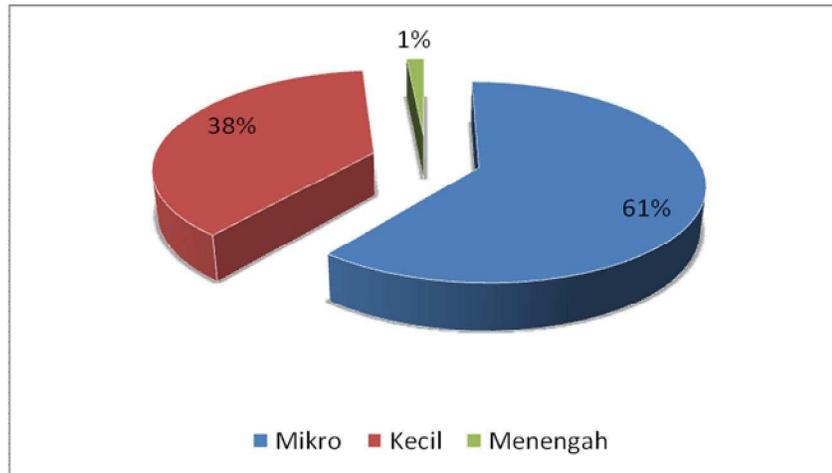
Berdasarkan deskripsi terhadap indikator perkembangan KSP/USP tersebut maka dapat dikemukakan bahwa selama tahun 2006-2008 KSP dan USP di Kabupaten Malang mengalami perkembangan yang cukup signifikan dilihat dari indikator kelembagaan koperasi meliputi perkembangan jumlah, anggota, penyerapan tenaga kerja, modal sendiri dan modal luar, serta indikator volume usaha.

### Perkembangan UMKM

Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Malang periode 2006-2008 terus mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 224.989 unit usaha pada tahun 2006, menjadi 227.107 unit pada tahun 2007 atau meningkat sebesar 0,94%, dan sebanyak 231.223 unit pada tahun 2008 atau meningkat 1,81%. Perkembangan UMKM di Kabupaten Malang ini ternyata masih lebih rendah dari data nasional yang mencapai perkembangan 2,88% pada tahun 2008.

Perkembangan UMKM jika dibandingkan berdasarkan skala usaha, baik usaha mikro, kecil maupun menengah dari tahun 2006 sampai dengan 2008 mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat pada gambar 3, dimana pada tahun 2007 usaha mikro meningkat 1,1%, usaha kecil meningkat 0,72% dan usaha menengah meningkat 0,26%, untuk tahun 2008 usaha mikro meningkat 2,17%, usaha kecil meningkat 1,30% dan usaha menengah meningkat 0,32%. Hal ini menunjukkan bahwa usaha mikro memberikan kontribusi terbesar dari perkembangan UMKM di Kabupaten Malang.





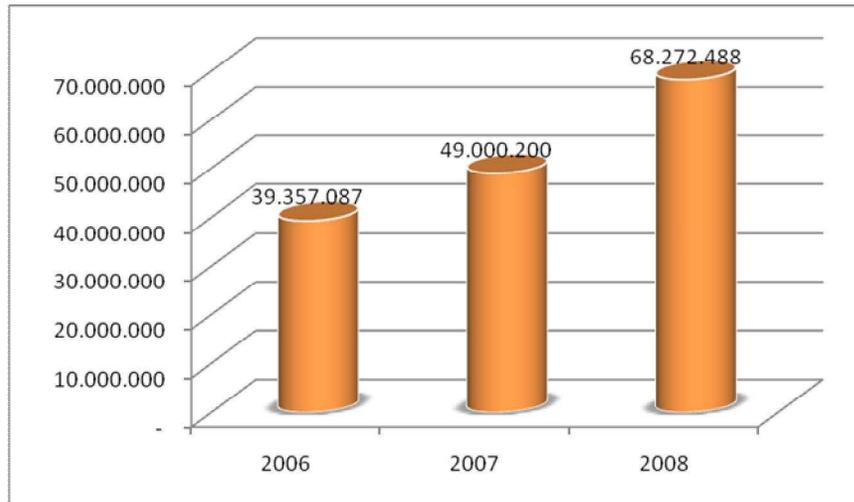
Gambar 3. Proporsi jumlah UMKM di Kabupaten Malang

Proporsi jumlah usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Malang pada tahun 2006-2008 didominasi oleh usaha mikro yaitu mencapai 61% (140.844 unit) dari UMKM yang ada, selanjutnya adalah usaha kecil sebesar 38% (86.947 unit) dari UMKM, dan untuk usaha menengah sebesar 1% (3.432) dari total UMKM yang ada.

### Omzet UMKM

Volume usaha atau omzet UMKM di Kabupaten Malang selama tahun 2006-2008 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1996 omzet UMKM mencapai Rp 39.357.087.000,-, dan meningkat menjadi Rp 49.000.200.000 pada tahun 2007 atau meningkat 24,5%, dan pada tahun 2008 mencapai Rp 68.272.488.000 atau meningkat 39,33% dari tahun 2007. Jika dibandingkan dengan data nasional pada tahun 2008, maka perkembangan omzet UMKM di Kabupaten Malang sedikit lebih tinggi dari perkembangan UMKM Nasional yang mencapai 38,88%.

Peningkatan omzet UMKM dari tahun 2006-2008 tersebut terutama didukung dari kontribusi usaha kecil yang mencapai 38% dari total omzet UMKM, berikutnya kontribusi usaha menengah sebesar 34,17%, dan kontribusi usaha mikro sebesar 27,61%. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Malang usaha kecil merupakan usaha yang sedang tumbuh baik dari segi jumlah maupun omzet. Dominasi volume usaha kecil di Kabupaten Malang ini ternyata berbeda dengan volume usaha UMKM tingkat nasional, dimana data nasional menunjukkan kontribusi terbesar volume usaha UMKM adalah dari usaha menengah yang mencapai 45,02%, selanjutnya usaha kecil 39,12% dan usaha mikro 15,86%. Hal ini cukup beralasan karena usaha menengah memiliki modal usaha yang jauh lebih besar dibandingkan usaha kecil dan mikro, walaupun dari sisi jumlah unit usaha, usaha mikro dan kecil jumlahnya lebih banyak dari usaha menengah.



Gambar 4. Omzet UMKM Kab. Malang

### Peran KSP/USP dalam Penguatan Permodalan UMKM

Berikut disajikan data nilai kredit yang disalurkan KSP dan USP, baik untuk kredit konsumsi maupun kredit produktif (modal kerja).

Tabel 1. Kredit yang Disalurkan KSP dan USP

Tahun	Kredit Konsumsi		Kredit Modal Kerja		Total Kredit (Rp juta)	Perkembangan (%)
	Jumlah (Rp juta)	Proporsi (%)	Jumlah (Rp juta)	Proporsi (%)		
2006	47.377,91	24,89	142.971,27	75,11	190.349,18	
2007	58.777,09	20,18	232.487,00	79,82	291.264,09	53,02
2008	71.007,75	15,49	387.402,54	84,51	458.410,30	57,39
Rata-rata		20,19		79,81		

Sumber: Data sekunder, diolah.

Perkembangan jumlah kredit yang disalurkan KSP/USP di Kabupaten Malang selama tahun 2006-2008 terus mengalami peningkatan, yaitu meningkat 53,02% pada tahun 2007 dan meningkat lagi sebesar 57,39% pada tahun 2008. Peningkatan yang cukup besar dari kredit yang disalurkan KSP/USP ini mencerminkan semakin tingginya apresiasi masyarakat kepada usaha KSP/USP, dengan kata lain semakin meningkatnya peran KSP/USP sebagai lembaga ekonomi rakyat.

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat diketahui bahwa total kredit yang disalurkan oleh KSP dan USP di Kabupaten Malang, sebagian besar disalurkan

pada kredit modal kerja bagi UMKM, dengan proporsi 75,11% pada tahun 2006, 79,81% pada tahun 2007 dan meningkat lagi menjadi 84,51% pada tahun 2008.

Dilihat dari karakteristik UMKM di Kabupaten Malang dimana sebagian besar adalah dalam bentuk usaha mikro yang memiliki ciri tidak bankable, maka alternatif pemenuhan kebutuhan permodalan adalah dari KSP/USP. Hal ini didukung dari data bahwa rata-rata selama tahun 2006-2008 sebesar 79,81% kebutuhan permodalan UMKM dipenuhi dari kredit yang disalurkan KSP/USP. Dengan demikian KSP/USP memiliki peran yang besar dalam pemenuhan kebutuhan permodalan bagi UMKM di Kabupaten Malang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur (2005) terhadap lembaga keuangan non bank (LKNB), untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, Situbondo, dan Jember menunjukkan bahwa partisipasi Lembaga Keuangan Non Bank dalam mendukung permodalan UKM pada ke-4 lokasi penelitian berkisar antara 49,43% sampai dengan 95,58% sedangkan partisipasi bank berkisar antara 10,90% sampai dengan 18,72%, dan sisanya adalah sumber modal sendiri.

Selain itu sejalan pula dengan hasil penelitian Wijono (2005) yang menyatakan bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan, dapat dilakukan dengan memperluas akses usaha kecil dan mikro (UKM) dalam mendapatkan fasilitas permodalan yang tidak hanya bersumber dari lembaga keuangan formal, tetapi juga dari lembaga keuangan mikro (LKM).

Keberadaan koperasi masih diharapkan karena memiliki peran strategis yang dapat diandalkan, utamanya dalam memberikan *multiplier effect* bagi usaha anggotanya, sehingga dapat mendukung serta mengembangkan ekonomi masyarakat yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Di samping itu, dengan berkembangnya koperasi diharapkan pula akan dapat mengeliminir kesenjangan pendapatan yang selama ini terjadi, sehingga pemerataan pendapatan secara adil pada seluruh masyarakat dapat menjadi kenyataan

Beberapa permasalahan yang diidentifikasi dalam perkembangan KSP/USP adalah:

#### **a. Kemampuan SDM**

Sebagai lembaga keuangan mikro, KSP dan USP sebenarnya memiliki aktivitas yang sama dengan lembaga keuangan seperti bank (BPR, BRI Unit), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Tetapi kenyataannya KSP dan USP umumnya tidak memiliki kemampuan sumberdaya manusia yang sepadan dengan bank, khususnya masalah manajemen keuangan. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan KSP/USP dalam menyusun laporan keuangan, hanya sedikit KSP/USP yang mampu menyusun laporan keuangan yang lengkap. Faktor penyebabnya adalah KSP/USP belum memiliki SDM yang memadai.

Permasalahan ini sejalan dengan hasil penelitian Sulaeman (2004) tentang pemberdayaan KSP dan USP, yang menyatakan bahwa KSP dan USP akan berkembang lebih pesat serta dapat lebih bermanfaat bagi anggotanya apabila didukung secara kuat oleh adanya sistem pengembangan keuangan

koperasi yang terintegrasi yang pengoptimalan dananya dilakukan oleh bank koperasi yang dimiliki dan sekaligus digunakan oleh anggotanya.

Oleh karena itu dalam upaya untuk pengembangan sistem keuangan koperasi yang terintegrasi maka langkah pertama yang dapat dilakukan koperasi adalah pembenahan kemampuan SDM khususnya kemampuan bidang manajemen keuangan.

**b. Rendahnya Kualitas Tata Kelola**

Dampak dari rendahnya kemampuan penyusunan laporan yang lengkap dari KSP/USP adalah belum memiliki informasi keuangan yang dapat dianalisis kinerjanya. Manajemen KSP/USP umumnya tidak mampu melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangannya, sehingga sulit untuk mengetahui tingkat kesehatannya, padahal evaluasi kinerja sangat penting sebagai sumber informasi bagi KSP/USP dalam menentukan strategi maupun pengambilan keputusan keuangan. Manajemen yang diterapkan KSP/USP umumnya adalah manajemen yang tradisional. Tidak heran beberapa kasus yang terjadi KSP/USP yang sebelumnya mengalami perkembangan usaha yang bagus tiba-tiba gulung tikar, karena tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran modal pinjaman (modal luar). Penyebabnya adalah koperasi belum melakukan analisis terhadap kredit bermasalah (NPL) sebagai rambu-rambu tingkat keamanan dari dana yang disalurkan, pada saat koperasi menghadapi kredit bermasalah yang tinggi, maka tidak akan mampu memenuhi kewajiban pada pihak ketiga.

**c. Sistem pembinaan yang belum efektif**

Pembenahan KSP/USP dilakukan pemerintah melalui Departemen Koperasi dan UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia. Departemen Koperasi dan UMKM memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan terhadap perkembangan koperasi dan UMKM. Pembinaan (bantuan teknis) dilakukan sejak pengajuan permohonan pendirian koperasi sampai selama koperasi menjalankan aktivitas usahanya. Seluruh kegiatan pembinaan ditujukan untuk menjamin pemberdayaan lembaga koperasi yang sehat sehingga benar-benar dapat mewujudkan tujuan dari koperasi yaitu peningkatan kesejahteraan anggota. Akan tetapi peran Departemen Koperasi dan UMKM masih belum optimal dalam melaksanakan fungsi pembinaan. Masalah rendahnya kemampuan SDM dan kualitas tata kelola KSP/USP sebenarnya merupakan masalah klasik yang sudah lama dihadapi KSP/USP tetapi kenyataannya sampai saat ini masalah-masalah tersebut masih terjadi pada KSP/USP, artinya tujuan dari fungsi pembinaan yang dilakukan belum mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Burhanuddin (2006) tentang Evaluasi Program Bantuan Dana Bergulir Melalui KSP/USP Koperasi, ditemukan berbagai permasalahan yaitu belum efektifnya proses dan kinerja tenaga pendampingan, proses monitoring dan evaluasi, efektivitas pencairan dan penyaluran dana bergulir bagi KSP/USP penerima bergulir, proses seleksi KSP/USP Koperasi calon penerima dana perguliran, sosialisasi manfaat program seleksi bagi para pengurus/pembina KSP/USP Koperasi.

KSP dan USP merupakan lembaga keuangan formal yang paling dekat dengan aktivitas UMKM, sehingga diharapkan dapat menjawab hambatan-hambatan yang dialami UMKM untuk mengakses pembiayaan dari perbankan karena tidak tersedianya jaminan yang layak. Oleh karena itu KSP dan USP seharusnya memiliki peran besar dalam pemberdayaan UMKM khususnya untuk penyediaan permodalan bagi UMKM. Lembaga keuangan formal non bank amat diperlukan dalam mendukung percepatan pemberdayaan UKM. Subandi (2007) dari hasil penelitiannya tentang kedudukan dan kiprah koperasi dalam mendukung pemberdayaan UKM menyatakan bahwa solusi yang diperlukan untuk memberdayakan koperasi sekarang ini adalah adanya komitmen yang kuat dan sekaligus upaya nyata dari pihak-pihak terkait khususnya pemerintah, gerakan koperasi dan lembaga koperasi untuk melakukan pembenahan dalam rangka pemurnian dan revitalisasi kegiatan usaha serta penguatan pembiayaan koperasi.

Beberapa permasalahan KSP/USP yang berhasil diidentifikasi dari hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Sulaeman (2004) bahwa kelemahan dari KSP/USP selama ini adalah 1) Belum adanya system pengembangan keuangan koperasi, dan 2) masih banyaknya KSP dan USP yang dalam kegiatannya melanggar aturan, khususnya PP No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam. Sejalan pula dengan hasil pengamatan Nurhayat Indra dkk (2002) mengenai KSP dan USP di Jawa Barat, diantaranya merekomendasikan sebagai berikut: 1) sistem pendataan kurang baik, 2) ketersediaan SDM dan dana bagi keperluan pengawasan relatif kecil, 3) tidak adanya jaminan bagi dana para penyimpan, 4) tidak adanya sanksi tegas terhadap KSP dan USP yang melanggar aturan, 5) terjadinya tumpang tindih/kerancuan hubungan dan koordinasi pelaksanaan tugas pengawasan antara dinas yang menangani koperasi di daerah dengan kementerian koperasi dan UKM.

Melihat peran strategis KSP/USP bagi pemberdayaan permodalan UMKM maka beberapa potensi dari KSP/USP adalah sebagai berikut:

1. KSP/USP memiliki potensi dalam mendorong pertumbuhan sektor riil khususnya UMKM. Pertumbuhan sektor UMKM, selanjutnya diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berkembangnya KSP dan USP disamping dalam skala mikro akan membantu mengembangkan kegiatan usaha skala kecil dan menengah, juga dalam skala makro akan berdampak membantu peningkatan perekonomian nasional.
2. Mampu memberikan berbagai jenis pembiayaan kepada UMKM walaupun tidak sebesar lembaga keuangan formal bank, sehingga menjadi alternatif pembiayaan yang cukup potensial mengingat sebagian besar pelaku UMKM belum dapat memanfaatkan lembaga keuangan bank. KSP/USP merupakan lembaga keuangan mikro non bank yang mudah diakses oleh usaha mikro dan kecil dalam pemenuhan permodalan, karena memberikan syarat yang mudah dalam pengajuan kredit dibandingkan dengan persyaratan yang ditetapkan perbankan.

3. Mampu menciptakan keterkaitan jalinan usaha kemitraan antara Koperasi-UMKM maupun pengembangan jaringan antar KSP/USP.

Sebagai lembaga keuangan mikro bukan bank yang diusahakan oleh lembaga ekonomi berbentuk koperasi, KSP dan USP mempunyai peluang yang cukup baik untuk mengembangkan usahanya. Kondisi

berkembangnya KSP dan USP sangat bergantung pada kemampuannya memanfaatkan peluang, baik peluang yang datang dari internal (kebutuhan anggota yang bersifat rutin dan kebutuhan anggota bagi tambahan modal kerja/investasi sebagai dampak dari berkembangnya usaha anggota yang pada umumnya sebagai pengusaha dengan skala kecil) dan peluang eksternal (kerjasama usaha dengan pihak lain dan mengembangkan jaringan antar koperasi).

4. Memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi intermediasi yaitu memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan pada sektor riil khususnya UMKM. Mengingat cukup strategisnya peran koperasi simpan pinjam dalam menyalurkan dan menampung dana anggota, Bank Indonesia (2001) menyebutkan bahwa dilihat dari jumlah pinjamannya (kredit/pembiayaan yang disalurkan), posisi KSP dan USP termasuk dua besar setelah BRI Unit Desa

## KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa selama tahun 2006-2008 KSP/USP di Kabupaten Malang mengalami perkembangan yang cukup signifikan dilihat dari 5 indikator kelembagaan koperasi. Sejumlah 4 indikator yaitu jumlah, anggota, penyerapan tenaga kerja, modal sendiri, serta indikator volume usaha semuanya mengalami peningkatan, hanya satu indikator yaitu modal pinjaman mengalami penurunan.
2. KSP/USP memiliki peran yang cukup besar dalam pemenuhan permodalan UMKM di Kabupaten Malang, ditunjukkan dari kemampuan KSP/USP dalam menyalurkan kredit mengalami peningkatan. KSP/USP mampu menyalurkan kredit modal kerja ke UMKM sebesar 79,81% dari total kredit yang disalurkan. Tingginya kemampuan KSP/USP dalam penyaluran kredit menunjukkan semakin meningkatnya peran KSP/USP dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.
3. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi dalam perkembangan KSP/USP adalah rindahnya kemampuan SDM, lemahnya tata kelola, dan belum optimalnya pembinaan dari pemerintah.

Adapun potensi-potensi KSP/USP di antaranya adalah mendorong pertumbuhan sektor riil khususnya UMKM, mampu menciptakan keterkaitan jalinan usaha kemitraan antara Koperasi-UMKM maupun pengembangan jaringan antar KSP/USP untuk perluasan akses, dan menjalankan fungsi intermediasi yaitu memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan pada sektor riil khususnya UMKM

## SARAN

1. Bagi koperasi disarankan sudah saatnya melakukan upaya perbaikan tata kelola terutama pengumpulan data keuangan secara lengkap. Data ini sangat berguna bagi koperasi untuk bahan evaluasi kinerja keuangan, sebagai bahan pengambilan keputusan maupun penentuan strategi pengembangan usaha. Untuk pembenahan tata kelola yang baik, bisa dibantu dengan pemanfaatan komputerisasi (sistem informasi berbasis komputer) dalam menjalankan fungsi pencatatan sampai pelaporan keuangan.
2. Perlunya upaya konkrit dalam pemberdayaan KSP/USP terutama dalam hal menjaga tingkat kesehatan KSP/USP. Hal ini perlu menjadi perhatian karena belum ada mekanisme pengawasan terhadap aktivitas KSP/USP seperti halnya pada bank yang dilakukan oleh BI. Sebab apabila KSP/USP telah menghimpun dana dari anggota tetapi dana yang berhasil dihimpun diinvestasikan pada aktiva lain yang beresiko, maka jika terjadi kerugian yang menanggung adalah anggota, padahal tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota.
3. Pemberdayaan koperasi termasuk KSP/USP yang selama ini telah dilakukan pemerintah tentunya perlu tetap dipertahankan, tetapi perlu dibarengi dengan evaluasi terhadap pelaksanaan, untuk menjamin bahwa pemberdayaan yang dilakukan tepat sasaran, karena bantuan-bantuan kepada KSP/USP selama ini terkesan berorientasi pada terlaksananya program yaitu besarnya dana yang dikucurkan, bukan pada efektivitas dari program.
4. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya melihat kontribusi KSP/USP dalam memenuhi permodalan UMKM, tidak mencakup pemanfaatan modal yang disalurkan koperasi ke UMKM. Oleh karena itu disarankan pada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini juga dari sisi UMKM khususnya dalam hal:
  - a. Bagaimana efektivitas pemanfaatan modal pinjaman KSP/USP oleh UMKM.
  - b. Selain itu penelitian ini juga bisa dikembangkan penelitian tentang peran lembaga keuangan formal (perbankan) dalam penguatan permodalan UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2007, *Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur. 2005. *Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Untuk Pemberdayaan UKM*.
- Badan Pusat Statistik, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). 2006
- Bagian Biro Perencanaan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, *Analisis Kinerja Koperasi 2004-2008*.

\_\_\_\_\_, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, *Statistik Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2006-2007*

\_\_\_\_\_, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, *Statistik Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2007-2008*

\_\_\_\_\_, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, *Statistik Perkoperasian 2007*

\_\_\_\_\_, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, *Statistik Perkoperasian 2008*

\_\_\_\_\_, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, *Statistik Perkoperasian 2009*

Burhanuddin, 2006. Evaluasi Program Bantuan Dana Bergulir Melalui KSP/USP, *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*, Nomor 1.

Djoko Retnadi. Deputy General Manager Micro Banking BRI, *Kompas*, 14 Desember 2007.

Ibrahim, Maulana. 2002. *Strategi Pengembangan LKM Di Masa Mendatang. Lokakarya Lembaga Keuangan Mikro Agro Berbasis Information and Communication Technology (ICT) untuk Mendukung Pengembangan Usaha Mikro*. Jakarta.

Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1999 tentang *Pemberdayaan Usaha Menengah*

Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tentang *Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil*

Nurhayat Indra dkk. 2002. *Ringkasan Studi Pengawasan KSP/USP dalam Rangka Otonomi Daerah di Jawa Barat*. Kementrian Negara Koperasi dan UKM, Jakarta.

Sarief, Saifuddin. 2004. *Kebijakan untuk Meningkatkan Iklim yang Kondusif dalam Mengembangkan UMKMK sebagai Kekuatan Ekonomi*.

*Statistik Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005-2006*. Kementerian Negara Koperasi & UKM bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik.

Subandi, Slamet, 2007. Kedudukan dan Kiprah Koperasi dalam Mendukung Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*, Nomor 1.

Sulaeman, Suhendar. 2004. Analisis Manfaat Lembaga Keuangan Berbentuk Koperasi (KSP/USP). *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. No. 2 Jilid 9.

Sumodiningrat, Gunawan, 2004, *Kebijakan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi dalam Rangka Penguatan Ekonomi Kerakyatan.*

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian*

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang *Usaha Kecil*

Wijono, Wiloejo Wirjo. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan (Edisi Khusus)*. November 2005.